



# **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**



## **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019**

### **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

## KATA PENGANTAR

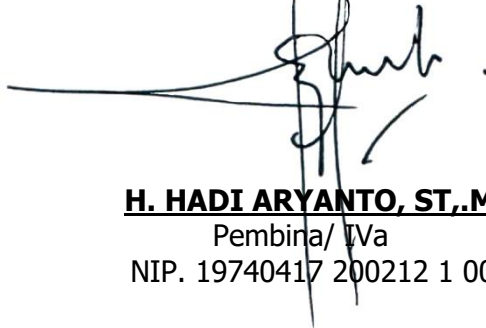
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan acuan perencanaan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019\ serta Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Penyusunan Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019.

Harapan kami semoga Renja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tideng Pale, 26 Maret 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**



**H. HADI ARYANTO, ST.,MT**

Pembina/ IVa

NIP. 19740417 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1-2

1.2. Landasan Hukum ..... 2-3

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 3

1.4. Sistematika Penulisan ..... 3-4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I  
Tahun 2018 dan Capaian Renstra..... 5-13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 15

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 16-21

3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018..... 21-27

**BAB IV PENUTUP**

Penutup..... 28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2019. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah 5 (lima) tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja (Renja) OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja OPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja OPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**



Maksud disusunnya Renja OPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan disusunnya Renja OPD adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pembangunan agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, sistematika Renja OPD disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Renja Tahun 2018.

##### **BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018**

Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan s.d. triwulan I Tahun 2018 dan hambatan atau kendala yang dihadapi pada bagian Perekonomian dan Pembangunan.

##### **BAB III. Tujuan, sasaran, dan Rencana Program dan Kegiatan Renja 2019**

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2019.

##### **BAB IV. Penutup**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

## **BAB II**



## **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2018 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Bagian Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan. Adapun fungsi bagian Perekonomian dan Pembangunan, yaitu ;

- a. Penyiapan rumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pembinaan dan pemberian bimbingan penyelenggaraan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan;
  - b. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIMPPD;
  - c. Terfasilitasinya dan terlayannya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE);
  - d. Rapat-rapat koordinasi bidang administrasi ekonomi dan pembangunan;
2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja :
  - a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran;
  - b. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
  - c. Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional;
  - d. Tersusunnya dokumen Renja PD;
  - e. Tersusunnya dokumen Renstra PD;
  - f. Peningkatan kapasitas aparatur bidang pengadaan barang dan jasa;
  - g. Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

- h. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD).

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2018, yang terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 0 % dan realisasi keuangan sebesar 0 %. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan disebabkan keterlambatan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta perubahan jadwal kegiatan.

**Tabel 1** : Realisasi kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU DANA (Rp)	REAL KEUANGAN	REAL FISIK (%)
			Rp.	FISIK
1	2	3	5	7
1	Portal Informasi Berbasis Web	107.000.000,00	0,00	0,00
2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	126.400.000,00	0,00	0,00
3	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	0,00	0,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	120.138.750,00	0,00	0,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	28.905.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.000.000,00	0,00	0,00
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	0,00	0,00
9	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah	80.500.000,00	0,00	0,00
10	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	14.400.000,00	0,00	0,00
11	Infrastruktur LPSE	361.300.000,00	0,00	0,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	0,00	0,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.800.000,00	0,00	0,00
14	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL)	57.600.000,00	0,00	0,00
16	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	408.500.000,00	0,00	0,00
17	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	420.976.250,00	0,00	0,00
18	Penyusunan dan pengumpulan data statistik Daerah	210.280.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.500.000.000,00	0,00	0,00

Dari 17 kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikelompokkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

- Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 0 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 0 kegiatan
- Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 18 kegiatan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bagian Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan tahun triwulan I tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran Tabel berikut :



**Tabel 2 : REKAPITULASI Hasil EVALUASI PELAKSANAAN RENJA EKOBANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

KODE	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2016-2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	
						TARGET RENJA TAHUN 2018	REALISASI RENJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2018	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI RENJA S/D TAHUN 2019	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
4.01.4.01.3.01	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran								
4.01.4.01.3.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penggunaan materai	3100 lembar	1000 lembar	500 lembar	200 lembar	40	500 lembar	1300 lembar	41.94
4.01.4.01.3.01.06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK mobil dinas yang diperpanjang	6 STNK	1 STNK	1 STNK	0	0	1 STNK	3 STNK	50.00
4.01.4.01.3.01.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	96 orang	27 orang	16 orang	0	0.00	16 orang	43 orang	44.79
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan PPTK	12 laporan	2 laporan	2 laporan	0	0.00	2 laporan	2 laporan	16.67
			Frekuensi pertemuan/ rapat kerja tenaga	36 kali	7 kali	6 kali	0	0.00	6 kali	7 kali	19.44
4.01.4.01.3.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)	240 jenis	78 jenis	40 jenis	30 jenis	75	40 jenis	108 jenis	45.00



		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan operasional kantor	3 Unit	1 unit	1 unit	0	0.00	1 unit	2 unit	66.67
4.01.4.01.3.01.11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan/ cetak spanduk	95 lembar	23 lembar	20 lembar	0	0	20 lembar	51 lembar	53.68
4.01.4.01.3.01.18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi atau kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh aparatur	420 keg	58 keg	70 keg	23 keg	32.86	70 keg	167 keg	39.76
4.01.4.01.3.01.19		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam daerah yang diikuti oleh aparatur	300 kali	48 kali	50 kali	7 kali	14.00	50 kali	113 kali	37.67
		Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak	15 Orang	1 Orang	3 Orang	2 Orang	66.67	3 Orang	9 Orang	60.00
<b>4.01.4.01.3.02</b>	<b>Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang efektif dan efisien</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan pelayanan publik Bagian</b>								
4.01.4.01.3.02.11		Infrastruktur LPSE	Jumlah tenaga pelaksana Tim LPSE	114 Orang	35 orang	16 orang	0	0	19 orang	54 orang	47.37
			Jumlah panitia pelaksana kegiatan pelatihan Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa	13 orang	13 orang	13 orang	0	0	0	13 orang	100
			Jumlah kapasitas jaringan/ koneksi internet LPSE	8 Mbps	6 Mbps	6 Mbps	6 Mbps	100	6 Mbps	6 Mbps	75.00



			Jumlah pelatihan Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa	2 Kali	1 Kali	1 Kali	0	0	1 Kali	2 Kali	100
4.01.4.01.3.02.24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi service kendaraan operasional kantor	24 kali	2 kali	4 kali	1 kali	25.00	4 kali	7 kali	29.17
			Jumlah pemeliharaan suku cadang kendaraan operasional kantor	25 jenis	6 jenis	6 jenis	0	0.00	8 jenis	14 jenis	56.00
			Jumlah bahan bakar/ pelumas yang digunakan	4050 liter	300 liter	960 liter	0	0.00	960 liter	1260 liter	31.11
4.01.4.01.3.02.28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 unit	1 unit	4 unit	0	0.00	2 unit	3 unit	25.00
			Jumlah pemeliharaan aset tetap kantor (server web SIMPPD)	5 Kali	1 kali	1 kali	0	0.00	1 kali	2 kali	40.00
4.01.4.01.3.		Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian sipil harian aparatur	108 set	0	24 set	0	0.00	25 set	25 set	23.15
<b>4.01.4.01.3.05</b>	<b>Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa</b>								
4.01.4.01.3.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis barang dan jasa	72 orang	15 orang	8 orang	0	0.00	12 orang	27 orang	37.50



4.01.4.01.3.06	Tersedianya sistem pelaporan yang akurat, cepat, serta akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah personil Tim monitoring percepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung	162 orang	54 orang	27 orang	0	0	27 orang	81 orang	50.00
			Frekuensi kegiatan rapat atau pertemuan Tim Monitoring	24 kali	4 kali	4 kali	0	0.00	4 kali	8 kali	33.33
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD)	5 kali	2 kali	1 kali	0	0	1 Kali	2 Kali	40.00
			Jumlah kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti aparat	162 kali	13 kali	30 kali	0	0.00	27 kali	40 kali	24.69
			Frekuensi kunjungan atau monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung	648 kali	20 kali	108 kali	0	0.00	108 kali	128 kali	19.75



			Terlaksananya peningkatan (upgrading) Web SIMPPD	3 kali	0	1 kali	0	0.00	1 kali	1 kali	33.33
			Tersedianya sarana prasarana penunjang sistem & Hosting web SIMPPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	12 bulan	24 bulan	40.00
4.01.4.01.3.06.06	Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD	RAKORDAL	Frekuensi pelaksanaan kegiatan RAKORDAL	12 kali	3 kali	2 kali	0	0	2 kali	5 kali	41.67
<b>4.01.4.01.3.31</b>	<b>Peningkatan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (LPSE).</b>	<b>Program Pendukung Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Prosentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</b>								
4.01.4.01.3.31.03		Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah personil/ panitia pengadaan barang dan jasa (ULP)	144 orang	46 orang	24 orang	0	0.00	24 orang	90 orang	62.50
			Jumlah penggunaan ATK (Jenis)	120 jenis	18 jenis	20 jenis	0	0.00	20 jenis	48 jenis	40.00
			Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh Tim ULP	288 kali	69 kali	48 kali	0	0	24 kali	93 kali	32.29
<b>4.01.4.01.3.15</b>	<b>Stabilitas harga barang dan jasa didaerah</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Terlaksananya kegiatan penyusunan buku Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>								
4.01.4.01.3.15.06		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah tenaga penyusun indeks	180 orang	53 orang	30 orang	0	0.00	30 orang	85 orang	47.22



			harga konsumen/ IHK								
			Jumlah kegiatan rapat kerja tim penyusun IHK	12 kali	1 kali	2 kali	0	0	2 kali	3 kali	25.00
			Jumlah buku atau laporan IHK	1584 laporan	264 laporan	264 laporan	0	0	264 laporan	528 laporan	33.33
			Jumlah Kunjungan atau monitoring ke pusat-pusat ekonomi masyarakat	18 kali	3 kali	3 kali	1 kali	0.00	3 kali	7 kali	38.89
<b>4.01.4.01.3.15</b>	<b>Stabilitas harga barang dan jasa didaerah</b>	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</b>	<b>Tersusunnya laporan Inflasi Kabupaten Tana Tidung</b>								
4.01.4.01.3.15.02		Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah personil pelaksana atau Tim Pengendali inflasi daerah (TPID)	138 orang	43 orang	23 orang	0	0.00	23 orang	66 orang	49.62
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan TPID	6 laporan	0	1 laporan	0	0	1 laporan	1 laporan	16.67
			Frekuensi rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	12 kali	0	2 kali	0	0	2 kali	2 kali	16.67
<b>4.01.4.01.3.</b>	<b>Peningkatan kualitas sistem pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengendalian pembangunan.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Terlaksananya sistem pengendalian pembangunan berbasis elektronik</b>								
4.01.4.01.3.		Portal Informasi Berbasis Web	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian	6 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	3 Kali	50.00



		pembangunan daerah (SIMPPD)								
		Terlaksananya peningkatan (upgrading) Web SIMPPD	3 Kali	0	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	2 Kali	6.67
		Tersedianya layanan hosting perangkat SIMPPD	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	24 Bulan	40.00



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja di bagian Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan dokumen renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta mengacu pada hasil output program kegiatan.

**Tabel 3** : Capaian kinerja bagian Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2018 :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)						REALISASI CAPAIAN (%)			PROYEKSI CAPAIAN (%)	CATATAN ANALISIS
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	95	100	100	100	100	100	93	98		100	
2	Jumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggarannya diatas 80%	90	95	95	97	98	100	86	93		97	
3	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	95	96	100	100	100	100	88	100		100	
4	Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE	95	100	100	100	100	100	95	100		100	
5	Jumlah pengguna (Penyedia) layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Tidung	92	95	100	100	100	100	92	92		100	
6	Jumlah Aparatur Bagian Perekonomian & Pembangunan yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa	80	70	85	90	95	100	80	50		90	
7	Persentase Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Tana Tidung	95	100	100	100	100	100	95	100		100	





### **2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan**

Sampai dengan triwulan I Tahun 2018 tingkat kinerja program dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan hampir seluruhnya memuaskan, artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah :

1. Perangkat Daerah kurang tertib dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan pada aplikasi sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD).
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan (Perbup pengendalian pembangunan) belum maksimal dikarenakan masih banyak PD belum melaksanakan sesuai petunjuk yang diatur didalamnya.
3. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa belum maksimal.
4. Masih banyak aparatur sipil Negara belum memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2018 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2016-2021. Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD, yaitu adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yaitu :

1. Menertibkan OPD dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan sesuai dengan kenyataan;
2. Pemanfaatan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis IT atau secara elektronik, guna mengefektifkan proses pemantauan dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan profesionalisme Tim ULP agar proses pengadaan barang dan jasa berlangsung akuntabel dan optimal agar pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi dengan cepat.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**RENJA 2019**

**3.1. Tujuan Dan Sasaran**

**a. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengoptimalkan pencapaian target Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Tana Tidung maka Renja perlu dirumuskan kembali. Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian dan Pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan.
- c. Meningkatnya sistem informasi pembangunan yang transparan.
- d. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

**b. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur.

**Tabel 4 : MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

NO.	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Masih lemahnya kualitas pengelolaan administrasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas sistem informasi pembangunan dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan pembangunan	Tersedianya sistem pelaporan yang akurat, cepat, serta akuntabel	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang diserahkan/ disampaikan oleh setiap SKPD	Optimalisasi penggunaan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis elektronik	Penyusunan laporan capaian/ realisasi fisik dan keuangan SKPD secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
						Melaksanakan proses peningkatan kapabilitas SKPD dalam menyusun pelaporan realisasi fisik dan keuangan
						Efektivitas pelaksanaan koordinasi serta fasilitasi peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian Pembangunan Daerah
						Melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD
2	Rendahnya tingkat kinerja pelaksanaan anggaran setiap SKPD yang berdampak langsung terhadap penyerapan APBD daerah	Tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas serapan anggaran pembangunan daerah	Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD	Mengembangkan proses monitoring dan pengendalian internal pelaksanaan anggaran setiap SKPD	Melaksanakan pemantauan secara intensif terhadap progres serapan anggaran setiap SKPD

						Meningkatkan koordinasi secara komprehensif baik yang berkaitan peraturan daerah maupun isu-isu strategis yang dihadapi daerah
						Melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD secara periodik melalui rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah
3	Menurunnya kepercayaan publik dala proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	Mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang prima dan akuntabel	Peningkatan pelayanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)	Jumlah penyedia barang dan jasa yang mendaftarkan perusahaannya sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah melalui LPSE	Memaksimalkan pelayanan LPSE serta sarana prasaran penunjang kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (E-Procurement)	Melaksanakan peningkatan kapasitas aparaturnya khususnya Tim LPSE sebagai langkah peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tupoksinya
						Melakukan upgrading kapasitas jaringan/koneksi internet LPSE
						Meningkatkan pengetahuan penyedia barang dan jasa berkaitan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE

		Mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang prima dan akuntabel	Peningkatan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (LPSE).	Presentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (E-Procurement)	Meningkatkan kinerja atau profesionalisme aparat/ Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai salah satu instrumen keberhasilan pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas serta profesionalisme Tim ULP dalam melaksanakan setiap proses pelelangan barang dan jasa
4	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan rutin	Tersedianya sarana dan prasarana tugas rutin	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan	Persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	Meningkatkan kualitas administrasi serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Memaksimalkan kegiatan surat menyurat sebagai salah satu upaya meningkatkan koordinasi antar SKPD
						Melakukan inventarisasi secara terukur terhadap segala kebutuhan pengadministrasian baik kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya periodik
						Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan serta pengawasan pelaksanaan setiap kegiatan organisasi
						Melaksanakan koordinasi serta konsultasi guna meningkatkan kinerja serta pelayanan baik internal maupun eksternal



						Melaksanakan koordinasi secara intensif guna fasilitasi mekanisme pengadaan barang dan jasa serta tata cara pengendalian pembangunan sebagai upaya meningkatkan realisasi anggaran setiap SKPD
		Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	Terjaganya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang efektif dan efisien	Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah	Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset kantor yang perlu diperbaiki serta menentukan skala prioritasnya
						Melaksanakan pengadaan aset yang diperlukan berdasarkan urgensi kebutuhannya, serta dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi
5	Masih kurangnya aparatur yang memiliki sertifikat kelulusan ahli pengadaan barang dan jasa	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme serta akuntabilitas sumber daya aparatur	Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah aparatur yang belum memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa	Merevitalisasi peran organisasi sebagai lembaga strategis dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memberikan kesempatan bagi aparatur/ PNS yang belum memiliki sertifikat untuk mengikuti kegiatan atau ujian keahlian barang dan jasa
6	Belum tersedianya regulasi tentang pengendalian inflasi di daerah	Merumuskan kebijakan pengendalian harga serta distribusi barang dan jasa guna menjaga implikasi negatif dari inflasi terhadap ekonomi masyarakat di daerah	Stabilitas harga barang dan jasa di daerah	Tingkat Indeks harga konsumen	Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Melakukan koordinasi dengan instansi ataupun lembaga terkait baik di daerah maupun luar daerah guna merumuskan kebijakan serta langkah-langkah penanganan inflasi di daerah



						Melakukan pengumpulan data atau bahan guna penyusunan laporan indeks harga konsumen (IHK) yang nantinya dapat digunakan sebagai alat merumuskan suatu kebijakan
--	--	--	--	--	--	---



### 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut ini :

NO.	KEGIATAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MANFAAT
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dana sebesar Rp. 4.000.000	Jumlah penyediaan materai 6.000	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan
2.	Penyediaan administrasi keuangan	Dana sebesar Rp. 251.787.000	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara teknis dan administratif	Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum administrasi pemerintahan
3.	Penyediaan alat tulis kantor	Dana sebesar Rp. 42.365.000	Jumlah jenis ATK	Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas rutin administratif kantor	Persebtase efektifitas pelaksanaan tugas-tugas rutin administratif perkantoran
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dana sebesar Rp. 7.000.000	Jumlah penyediaan spanduk	Terpenuhinya sarana dan prasarana rutin pendukung penyelenggaraan hari-hari penting pemerintah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dana sebesar Rp. 27.000.000	Jumlah penyediaan CCTV & Fingger Lock Pintu Ruang Server	Terciptanya standar keamanan sarana & prasarana LPSE	Persentase peningkatan mutu layanan pengadaan barang & jasa pemerintah
6.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dana sebesar Rp. 500.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan-kegiatan	Terlaksananya kegiatan-kegiatan	Persentase penigkatan kualitas penyelenggaraan





			kedinasan luar daerah	kedinasan luar daerah	pemerintahan daerah (good governance)
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, pembinaan & pengawasan ke dalam daerah	Dana sebesar Rp. 200.000.000	1)Jumlah aparatur yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam daerah. 2) Frekuensi pelaksanaan monitoringkegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kedinasan dalam daerah	Persentase peningkatan intensitas pengawasan, pengendalian, serta pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD
8.	Penunjang urusan administrasi pemerintahan	Dana sebesar Rp. 57.600.000	Jumlah tenaga kontrak	Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran	Persentas peningkatan kualitas penyelenggaraan perkantoran
9.	Infrastruktur LPSE	Dana sebesar Rp. 704.500.000	1) Jumlah personil Tim LPSE. 2)Jumlah kapasitas bandwidth internet LPSE. 3)Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek LPSE.	1) Terlaksananya proses pengadaan barang & jasa secara eletronik (e-procurement). 2)persentase fasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dialami para pengguna (user) system pengadaan secara elektronik (SPSE)	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi LPSE
10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dana sebesar Rp. 38.000.000	1)Frekuensi perawatan/service kendaraan mobil dinas kantor. 2)jumlah bahan bakar yang digunakan mobil dinas kantor	1)Terlaksnanya tugas-tugas kedinasan. 2)Terpenuhinya sarana mobilitas dalam rangka tugas-tugas rutin kantor	Tercapainya pengelolaan sarana & prasarana kantor yang efektif dan efisien
11.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dana sebesar Rp. 35.000.000	Jumlah perbaikan peralatan kantor	Persentase pelaksanaan pemeliharaan rutin peralatan kantor	Terciptanya pengelolaan sarana & prasarana



					operasional kantor
12.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dana sebesar Rp. 100.000.000	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme serta akuntabilitas sumber daya aparatur
13.	Rapat koordinasi dan pengendalian (RAKORDAL)	Dana sebesar Rp. 124.200.000	1) Frekuensi pelaksanaan RAKORDA. 2) Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan RAKORDAL	Persentase rata-rata capaian realisasi fisik & keuangan OPD	Terwujudnya efisiensi & efektifitas serapan APBD
14.	Monitoring, evaluasi, pengendalian & pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Dana sebesar Rp. 1.342.800.000	1) Jumlah personil tim monitoring percepatan pembangunan Kab. Tana Tidung. 2) Frekuensi kegiatan rapat tim monitoring percepatan pembangunan Kab. Tana Tidung. 3) Frekuensi monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kab. Tana Tidung.	Terlaksananya program-program pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan transparan	Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas serta percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah
15.	Pengolahan, updating, dan analisa data dan statistik daerah	Dana sebesar Rp. 203.600.000	1) Jumlah personil Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 2) Frekuensi rapat TPID. 3) Jumlah laporan TPID	Terlaksananya laporan proses pengawasan barang (sembako) inflasi Kab. Tana Tidung	Terwujudnya stabilitas harga pasar
16.	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Dana sebesar Rp. 391.300.000	1) Jumlah personil Tim penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK). 2) Jumlah laporan/buku IHK	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan indeks harga konsumen (IHK)	Terumuskannya kebijakan ekonomi bidang UKM

17.	Unit Layanan pengadaan (ULP)	Dana sebesar Rp. 1.856.085.000	1)Jumlah personil tim ULP. 2)Jumlah personil ULP yang mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pelaksanaan pengadan barang dan jasa pemerintah	Terwujudnya tata kelola pengadan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel
18.	Portal informasi berbasis Web	Dana sebesar Rp. 117.300.000	1)jumlah pelatihan administrator system informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD).	1)Tersedianya system pelaporan kinerja dan capaian realisasi fisik & keuangan yang cepat dan akurat. 2)Persentase efektifitas laporan berbasis Web	1)Terwujudnya system pelaporan dan kinerja OPD yang akurat dan objektif. 2) Terciptanya proses pemantauan kegiatan yang efektif dan serapan anggaran yang optimal

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJUN TAHUN 2020  
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran		98%	Rp 853,887,000			98%	Rp 910,487,000	
4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penggunaan materai	Kabupaten Tana Tidung	300 Lembar	Rp 1,800,000	APBD		400 Lembar	Rp 2,400,000	
4.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BPKB mobil dinas yang diperpanjang	Kabupaten Tana Tidung	1 Unit	Rp 1,000,000	APBD		1 Unit	Rp 3,000,000	
4.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kabupaten Tana Tidung	17 Orang	Rp 251,787,000	APBD		17 Orang	Rp 251,787,000	
		Frekuensi pertemuan atau rapat kerja tenaga	Kabupaten Tana Tidung	4 Kali	Rp 7,000,000	APBD		4 Kali	Rp 8,000,000	
		Jumlah laporan PPTK	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 1,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 2,000,000	
4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)	Kabupaten Tana Tidung	40 Jenis	Rp 30,000,000	APBD		40 Jenis	Rp 30,000,000	



4.01.03.0 1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan/ cetak spanduk	Kabupaten Tana Tidung	20 Lembar	Rp 7,500,000	APBD		20 Lembar	Rp 9,500,000	
4.01.03.0 1.22	Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan tenaga kontrak	Kabupaten Tana Tidung	2 Orang	Rp 52,800,000	APBD		2 Orang	Rp 52,800,000	
4.01.03.0 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi atau kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh aparatur	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 400,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 400,000,000	
4.01.03.0 1.19	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam daerah yang diikuti oleh aparatur	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 100,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 150,000,000	
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 1,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 1,000,000	
4.01.03.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan pelayanan publik Bagian Ekobang		90%	Rp 782,500,000			90%	Rp 720,100,000	
4.01.03.0 2.11	Infrastruktur LPSE	Jumlah tenaga pelaksana Tim LPSE	Kabupaten Tana Tidung	19 Orang	Rp 285,500,000	APBD		19 Orang	Rp 285,500,000	
		Jumlah kapasitas jaringan/ koneksi internet LPSE	Kabupaten Tana Tidung	6 Mbps	Rp 211,000,000	APBD		6 Mbps	Rp 211,000,000	
		Frekuensi pelatihan penyedia barang dan jasa	Kabupaten Tana Tidung	2 Kali	Rp 15,000,000	APBD		2 Kali	Rp 15,000,000	
		Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis LPSE	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 100,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 150,000,000	
		Jumlah pengadaan media informasi LPSE (Kalender & Stan banner)	Kabupaten Tana Tidung	1 Paket	Rp 15,000,000	APBD		1 Paket	Rp 15,000,000	



4.01.03.0 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis spare part mobil dinas yang diperbaiki	Kabupaten Tana Tidung	7 Jenis	Rp 15,000,000	APBD		7 Jenis	Rp 20,000,000	
		Jumlah bahan bakar/ pelumas yang digunakan	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 9,600,000	APBD		1 Tahun	Rp 9,600,000	
		Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 2,400,000	APBD		1 Tahun	Rp 3,000,000	
4.01.03.0 2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 9,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 11,000,000	
4.01.03.0 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	Kabupaten Tana Tidung	1 Paket	Rp 120,000,000	APBD		-	Rp -	
4.01.03.0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa		60%	Rp 415,000,000			90%	Rp 150,000,000	
4.01.03.0 5.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 100,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 150,000,000	
4.01.03.0 5.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan (Perpres PBJ)	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan dan paham Perpres PBJ No.16 Tahun 2018	Kabupaten Tana Tidung	1 Kali	Rp 315,000,000	APBD		-	Rp -	
4.01.03.0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90%	Rp 1,243,424,000			90%	Rp 1,258,800,000	
4.01.03.0 6.19	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah tenaga atau Tim monitoring percepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten Tana Tidung	27 Orang	Rp 930,000,000	APBD		27 Orang	Rp 930,000,000	



		Frekuensi kegiatan rapat atau pertemuan Tim Monitorin gpercepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten Tana Tidung	2 Kali	Rp 8,624,000	APBD		2 Kali	Rp 24,000,000	
		Jumlah kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti aparat	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 100,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 100,000,000	
		Frekuensi kunjungan atau monitoring kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 80,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 80,000,000	
4.01.03.0 6.06	RAKORDAL	Frekuensi pelaksanaan kegiatan RAKORDAL	Kabupaten Tana Tidung	2 Kali	Rp 105,000,000	APBD		2 Kali	Rp 105,000,000	
		Frekuensi pelaksanaan rapat kerja	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 18,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 18,000,000	
		Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan RAKORDAL	Kabupaten Tana Tidung	2 Kali	Rp 1,000,000	APBD		2 Kali	Rp 1,000,000	
		Jumlah penggunaan jasa dokumentasi	Kabupaten Tana Tidung	2 Kali	Rp 800,000	APBD		2 Kali	Rp 800,000	
4.01.03.3 1	Program Pendukung Administrasi Pemerintahan	Prosesntase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik		100%	Rp 1,805,700,000			100%	Rp 1,856,000,000	
4.01.03.3 1.03	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah tenaga/ panitia pengadaan barang dan jasa (ULP)	Kabupaten Tana Tidung	24 Orang	Rp 1,235,000,000	APBD		24 Orang	Rp 1,235,000,000	
		Jumlah penggunaan ATK (Jenis)	Kabupaten Tana Tidung	10 Jenis	Rp 15,000,000	APBD		10 Jenis	Rp 15,000,000	



		Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti ULP	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 250,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 250,000,000	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan luar daerah yang diikuti oleh Tim ULP	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 300,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 350,000,000	
		Jumlah sarana penunjang administrasi ULP	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 5,700,000	APBD		1 Tahun	Rp 6,000,000	
4.03.4.01.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya kegiatan penyusunan buku Indeks Harga Konsumen (IHK)		1 Buku	Rp 391,300,000			1 Buku	Rp 391,300,000	
4.03.4.01.03.15.06	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah tenaga pendataan indeks harga konsumen	Kabupaten Tana Tidung	30 Orang	Rp 306,350,000	APBD		30 Orang	Rp 306,350,000	
		Jumlah buku atau laporan IHK	Kabupaten Tana Tidung	286 Buku/Dokumen	Rp 44,600,000	APBD		286 Buku/Dokumen	Rp 44,600,000	
		Jumlah Kunjungan atau monitoring ke pusat-pusat ekonomi masyarakat	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 40,350,000	APBD		1 Tahun	Rp 40,350,000	
2.14.4.01.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersusunnya laporan Inflasi Kabupaten Tana Tidung		100%	Rp 163,600,000			100%	Rp 163,600,000	
2.14.4.01.03.15.02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah tenaga pelaksana atau Tim Pengendali inflasi daerah (TPID)	Kabupaten Tana Tidung	23 Orang	Rp 102,600,000	APBD		23 Orang	Rp 102,600,000	
		Frekuensi rapat koordinasi luar daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 60,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 60,000,000	
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan TPID	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 1,000,000	APBD		1 Tahun	Rp 1,000,000	
2.10.4.01.03.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	<b>Terlaksananya sistem pengendalian pembangunan berbasis elektronik</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 117,300,000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	





2.10 . 4.01.03 . 20 . 01	Portal Informasi Berbasis Web	Jumlah tenaga pendamping portal informasi	Kabupaten Tana Tidung	23 Orang	Rp 25,000,000	APBD				
		Jumlah materi pelatihan admin SIMPPD	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 3,300,000	APBD				
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan admin Sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah (SIMPPD)	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 15,000,000	APBD				
		Jumlah seminar kit pelaksanaan pelatihan admin SIMPPD	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 32,000,000	APBD				
		Tersedianya layanan hosting perangkat SIMPPD	Kabupaten Tana Tidung	1 Tahun	Rp 42,000,000	APBD				
		<b>TOTAL</b>			<b>Rp 5,772,711,000</b>			<b>Rp 5,450,287,000</b>		



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2019, sehingga upaya Bagian Perekonomian dan Pembangunan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Perekonomian dan Pembangunan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan cerminan dan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik. Demikian Rencana Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2019 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 26 Maret 2018

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,**



**H. HADI ARYANTO, ST., MT**

Pembina IVa

NIP. 19740417 200212 1 003

